



Korupsi

Musuh Bersama

“**P**erjalanan sistem demokrasi di Indonesia sudah terbilang lama sejak tahun 1959. Namun tugas pemberantasan korupsi di Indonesia masih harus berlangsung beberapa generasi lagi ke depan. Sistem demokrasi di Indonesia terbukti tidak mampu mengurangi jumlah dan besaran korupsi. Ironinya, korupsi itu justru dilakukan oleh para penyelenggara negara yang dipilih rakyat dan juga anggota-anggota DPR yang notabene berfungsi mengawasi pemerintahan atas nama rakyat.” Kalimat ini merupakan cuplikan penting dari tulisan **Said Zainal Abidin** dalam jurnal edisi ini. Beliau yang pernah menjadi Penasehat KPK mengulas pelbagai kendala dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan menawarkan beberapa solusi penting secara komprehensif.

Mr. Mohamad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama pernah mengingatkan bahwa Korupsi telah menjadi “budaya”. Kemudian di era Orde Baru, Soemitro Djojohadikoesoemo kembali mengingatkan bahwa sekitar 30% anggaran pembangunan telah dikorupsi. Sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa cita-cita para pendiri Republik ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat-bangsa yang mereka perjuangkan melalui program-program pembangunan nasional yang dibarengi dengan kejujuran, keikhlasan dan pengorbanan yang tinggi, ternyata telah dikotori oleh generasi berikutnya dengan ketidakjujuran, ketidakikhlasan, selalu minta pamrih, malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga negeri tercinta ini menjadi tersohor sebagai negara yang terkorup di dunia. Negeri yang dulu termasyur dengan ungkapan *gemah ripah loh jinawi* serta masyarakatnya yang ramah tamah, ternyata telah menyimpan potensi kebengisan, dendam, iri dengki

pada sesama bangsanya dengan terbukti berkembangnya korupsi. Sebab kita mengetahui bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ia tidak saja merugikan, tetapi menghancurkan masyarakat, bangsa dan negara.

Dari sisi motif menurut Lembaga Pencegah Korupsi (LPK), korupsi secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga hal yaitu:

1. ***Corruption by need***, yaitu korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan tambahan pendapatan (income) untuk memenuhi keperluan hidup. Etika profesi yang seharusnya dihormati tidak lagi dapat dilaksanakan jika dari profesi yang dijalani, seseorang tidak memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup minimalnya. Disini dia terpaksa melakukan perbuatan tercela sekedar untuk *survive*.
2. ***Corruption by greed***, yaitu korupsi yang dilakukan karena keserakahannya. Umumnya dipraktikkan oleh pribadi yang sudah mempunyai status sosial yang tinggi / mapan. Penghasilan sah yang diperoleh setiap bulan sudah cukup untuk hidup secara layak, tetapi dengan keserakahannya ia masih melakukan korupsi.
3. ***Corruption by political interest***, yaitu korupsi yang dilakukan dengan motif kepentingan politik. Dalam hal ini, para penyelenggara negara dan politisi, ditengarai banyak melakukan korupsi untuk meraih kekuasaan politik.

Ketiga jenis korupsi tersebut diatas di Indonesia menggurita, bahkan saat ini, korupsi terjadi di seluruh penyelenggara Negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan terjadi hampir di semua institusi resmi seperti BUMN, dan strata sosial politik seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Keadaan sekarang sangat memprihatinkan, karena ditengah maraknya demokrasi, marak pula praktek korupsi. Gambaran ini cukup mengerikan bagi suatu bangsa yang sedang membangun yang ingin mewujudkan masyarakat bangsanya hidup berkecukupan, sejahtera, adil dan makmur. Untuk menghadapi korupsi ini kita harus seayun selangkah seia sekata untuk menjadikan korupsi musuh bersama, musuh bangsa yang beradab.

Disamping topik Korupsi, jurnal edisi ini juga mengangkat beberapa artikel menarik yaitu Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Kultur Organisasi yang ditulis oleh Murniati Ar Guru Besar FKIP Unsyiah. Dalam ulasannya ia menyebutkan bahwa Kultur Organisasi harus bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan internal dan eksternal organisasi. Dalam pengembangan kultur organisasi perlu melaksanakan manajemen strategik. Manajemen strategik berorientasi pada kondisi internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Tulisan lain oleh DR. Nasir Usman dosen FKIP Unsyiah dengan judul Balance Scorecard Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi. Point penting yang disampaikan dalam artikel ini adalah Salah satu strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah melalui balance scorecard. Balance scorecard berorientasi pada pengukuran kinerja

yang dilihat perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan.

Akhirnya kami dari Redaksi mengucapkan selamat membaca, semoga melalui jurnal ini terjadi transformasi *knowledge* yang membangun kecerdasan bangsa.

Faizal Adriansyah